

## DAFTAR PUSTAKA

- Badrudin, Ali. 2009. *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*. Jakarta : Prisma.
- Bagus, I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13.1 ISSN: 2302-8556
- Boediono. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Devas, Nick. 2005. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta : Indonesia. Ghalia.
- Ghozali, Imam. , 2007. *Ekonometrika Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Halim, Abdul. 2003. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Permatasari Isti. 2016. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 1, Januari 2016 : ISSN : 2460-0585.
- Koswara, E. 2000. *Menyongsong Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999: Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan dan Kompleksitasnya*. Jakarta.
- Kaho, Yosef Riwu. 2007. *Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Kartasasmita 2004. *Perekonomian Indonesia, Masalah dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta : UPFE-UMY.
- Mamesah, D, J. 2005. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

- Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2004. *Analisis pengaruh dana alokasi umum (dau) dan pendapatan asli daerah (pad) terhadap prediksi belanja daerah (studi empiris di wilayah propinsi jawa tengah dan diy)*. Vol 8 No 2.
- Pamudji. 2007. *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Bina Aksara.
- Purnomo, Budi. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Riduwan, 2007. *Pengantar Statistika. Untuk penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sadono, Sukirno. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. LP3ES UI : Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Gahalia Indonesia.
- Sidik, Machfud. 2012. *Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.* Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah". STIA LAN Bandung.
- Setiyani, C. D. 2009. *Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Peranannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2002. *Ekonomi Pembangunan, Problematika dan Pendekatan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan dan Akdon. 2009. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa : Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta : Grafindo.

Widjaya, H.A.W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-undang Nomor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

